



EKO DJOKO WIDIYATNO SH MH Kawal Pemerataan Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran



Eko Djoko Widiyatno SH MH, anggota DPRD Kota Yogya yang berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menaruh perhatian khusus terkait pemerataan pembangunan. Apalagi Djoko, sapaan akrabnya, mendapat mandat sebagai Sekretaris Komisi C yang salah satunya membidangi urusan infrastruktur. "Bagi pemerintah tentu tidak mudah ketika kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal kemudian harus dilakukan refocusing dan efisiensi. Tetapi kita harus optimis menatap ke depan, karena kami sebagai wakil rakyat sekaligus mitra eksekutif akan selalu terbuka memberikan solusi atas setiap persoalan," urainya, Rabu (26/2).

Politisi PKB ini pun memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkot Yogya yang mampu responsif dalam menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat. Kendati ada beberapa kegiatan yang terpaksa ditunda realisasinya tahun ini, namun hal itu tetap mengedepankan aspek skala prioritas. Kebutuhan dasar masyarakat dia pastikan

YOGYA (KR) - Hampir semua daerah di Indonesia mengalami persoalan yang sama seiring adanya refocusing dan efisiensi anggaran pada awal tahun ini. Meski demikian legislatif tetap memiliki tugas untuk mengawal pemerataan pembangunan di tengah kondisi tersebut.

tetap terjamin, dan pihaknya di lembaga dewan juga tidak akan pernah berhenti melakukan pengawasan.

Terkait dengan pekerjaan infrastruktur, Djoko berharap ajakan kolaborasi yang dilontarkan Wakil Walikota Yogya Wawan Harmawan ketika membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X Gapensi Kota Yogya, mampu disambut dengan baik oleh para pelaksana konstruksi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara unsur pemerintah dengan pengusaha atau swasta bisa menjadi jembatan di tengah efisiensi anggaran. "Saya yakin rekan-rekan Gapensi Kota Yogya mampu memahami kondisi saat ini. Profesionalisme menjadi unsur penting agar kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Kuncinya adalah akses pembangunan di tiap wilayah bisa sesuai dengan kebutuhan," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya bersama jajaran anggota dewan di Komisi C rutin mengundang mitra kerja eksekutif untuk melakukan berbagai pembahasan.

Harapannya ketika sewaktu-waktu terjadi perubahan atau refocusing kembali maka pemerintah bisa langsung sigap. Apalagi ada informasi jika alokasi anggaran yang sempat disisihkan oleh daerah untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya akan diakomodir oleh pusat. Dengan demikian, anggaran sekitar Rp 80 miliar jika akhirnya dikembalikan ke daerah bisa langsung dialokasikan ke pos kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Kepastiannya tinggal menunggu juknis atau juklaknya. Tetapi yang pasti, pemerataan pembangunan bukan berarti setiap wilayah mendapat intervensi yang sama melainkan sesuai kebutuhan masing-masing. Ini yang harus tepat sasaran karena pembangunan yang merata menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan," katanya.

(Dhi)-f



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005